BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SELASA, 18 Juni 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [ ] NETRAL [x] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Dewan Minta Temuan BPK Ditindaklanjuti

KOTA MANNA - Komisi II DPRD BS secar resmi kemarin (17/6) panggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini terkait temuan BPK RI.

Pada pemanggilan itu ada beberapa OPD yang hadir. Yakni Dinas PUPR, Dinas Perindagkop dan UM, dan Inspektur Daerah (Ipda) selaku leading sektor Pemda dalam menindaklanjuti LHP BPK.

Dalam hearing itu, OPD menyampaikan alasan terjadinya temuan kelebihan bayar, ataupun kesalahan penganggaran dibeberapa kegiatan sehingga menjadi temuan BPK. "Kami minta langsung penjelasan kepada OPD penyebab terjadi temuan BPK. Tadi (kemarin red.) sudah mereka jelaskan masalah itu," kata Waka I DPRD BS, Susman Hadi, SP, MM.

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan OPD, terjadi temuan BPK disebabkan banyak faktor. Diantaranya ada kekeliruan dalam mempedomani aturan yang menjadi dasar pekerjaan. Serta kelalaian pihak terkait. ''Yang seperti itulah kami minta agar OPD membenahinya supaya tidak terjadi lagi ke depan," ujar Susman.

Dewan juga menyarankan agar OPD secepatnya untu melunasi temuan BPK yang masuk dalam kategori TGR, atau kelebihan bayar. Serta menindaklanjuti temuan administrasi untuk dapat dibenahi mekanisme kegiatan yang menyalahi aturan.

"Diminta supaya OPD cepat menindaklanjuti LHP BPK. Maksimal 60 hari setelah LHP itu diterima. Soalnya, kalau sudah lewat dari itu, bisa bermasalah. Jangan sampai nanti berurusan dengan hukum," saran Susman.

Setelah dibahas bersama OPD, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada eksekutif terkait rekomendasi LHP BPK tersebut. Tujuannya untuk memberi masukan atau saran supaya ke depan bisa lebih baik.**(tek)**